

Perbandingan Pengelolaan Kinerja Keuangan Negara di Negara Berkembang dan Negara Maju (Studi Kasus Indonesia dan Singapura)

Zalika Adinda Hasibuan^{a,*}, Timbul Dompok^b, Lubna Salsabilla^c

^{a,b,c} Administrasi Negara, Sosial Humaniora, Universitas Puera Batam, Kepri

pb231010011@upbatam.ac.id

Abstract

This research aims to compare the management of national financial performance in developing and developed countries through case studies of commercial banks in Indonesia and Singapore. This research uses a comparative descriptive approach by analyzing data from reliable sources. The results show that there are significant differences between developing and developed countries in terms of national financial performance management. It also shows that developed countries such as Singapore have a more stable and effective financial structure in managing financial performance, especially in terms of liquidity and financial risk monitoring. The national financial management system of developed countries is generally more transparent, accountable, and efficient than developing countries. On the other hand, developing countries such as Indonesia still face challenges such as limited resources and lack of effective supervision in managing financial performance. Singapore's financial policies are clearer and more consistent, and its financial structure is stronger and more stable. On the other hand, Indonesia still faces challenges in financial performance management such as limited resources and lack of effective supervision.

Keywords: State Financial Performance Management, State Commercial Banks, Law Enforcement, Quality of Human Resources, Transparency, Accountability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengelolaan kinerja keuangan nasional di negara berkembang dan maju melalui studi kasus bank umum di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan menganalisis data dari sumber yang dapat dipercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara negara berkembang dan maju dalam hal pengelolaan kinerja keuangan nasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara maju seperti Singapura memiliki struktur keuangan yang lebih stabil dan efektif dalam pengelolaan kinerja keuangan terutama dari segi likuiditas dan keuangan pemantauan risiko. Sistem pengelolaan keuangan nasional negara maju umumnya lebih transparan, akuntabel, dan efisien dibandingkan negara berkembang. Di sisi lain, negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pengawasan yang efektif dalam pengelolaan kinerja keuangan. Kebijakan keuangan Singapura lebih jelas dan konsisten, serta struktur keuangannya lebih kuat dan stabil. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan kinerja keuangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pengawasan yang efektif.

Kata Kunci: Pengelolaan Kinerja Keuangan Negara, Bank Umum Negara, Penegakan Hukum, Kualitas SDM, Transparansi, Akuntabilitas.

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan nasional yang efektif dan efisien merupakan faktor penting dalam mencapai pembangunan nasional. Keuangan negara yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efektivitas pengelolaan fiskal nasional

bervariasi antar negara. Negara maju umumnya mempunyai sistem pengelolaan keuangan nasional yang lebih baik dibandingkan negara berkembang. Hal ini tercermin dari indikator kinerja keuangan nasional yang lebih baik di negara-negara maju. Pengelolaan kinerja fiskal nasional merupakan aspek penting dalam mencapai stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Kinerja fiskal nasional yang baik akan

mendukung pemerintah dalam melaksanakan berbagai rencana pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam.

Pengelolaan kinerja fiskal nasional antara negara berkembang dan negara maju. Sistem pengelolaan keuangan nasional negara maju umumnya lebih transparan, akuntabel, dan efisien dibandingkan negara berkembang. Hal ini tercermin dari indikator kinerja keuangan sektor publik yang lebih baik di negara maju dibandingkan di negara berkembang. Perbedaan pengelolaan keuangan nasional antara negara maju dan berkembang mungkin disebabkan oleh meningkatnya korupsi, penegakan hukum, dan kualitas sumber daya manusia.

Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perbedaan pada kinerja keuangan negara yaitu tingkat korupsi yang tinggi di negara berkembang dapat menghambat pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien. Korupsi dapat menyebabkan kebocoran dana negara, penyalahgunaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa yang tidak berkualitas. Hal ini dapat berakibat pada penurunan kualitas layanan publik dan terhambatnya pembangunan nasional. Di sisi lain, negara maju umumnya memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan lebih transparan dan akuntabel.

Penegakan hukum yang lemah di negara berkembang juga dapat menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat berakibat pada penyimpangan dana negara, penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Sebaliknya, negara maju umumnya memiliki penegakan hukum yang lebih kuat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menegakkan peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara dengan lebih efektif.

Kualitas SDM di negara maju umumnya memiliki SDM yang lebih berkualitas tinggi dalam pengelolaan keuangan negara dan memiliki aparat pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Sedangkan, di negara berkembang kualitas SDM dalam bidang pengelolaan keuangan negara masih rendah dan aparat pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara masih kurang kompeten dan profesional. Dampak dari perbedaan pengelolaan kinerja keuangan negara dapat berakibat pada kualitas pelayanan publik, di negara maju kualitas pelayanan publiknya jauh

lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel dan efisien. Tingkat pembangunan juga menjadi dampak dari pengelolaan keuangan negara, karena jika dibandingkan di negara maju memiliki tingkat perbandingan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan negara dengan lebih tepat sasaran. (2022)

Indonesia dan Singapura adalah dua negara di Asia tenggara yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda. Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang, sedangkan Singapura dikategorikan sebagai negara maju. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi ini dapat dilihat dari berbagai indikator pengelolaan kinerja keuangan negara. Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja keuangan negara seperti;

- Rasio Laba Bersih terhadap Aset (ROA): Mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya.
- Rasio Kredit Bermasalah (NPL): Mengukur persentase kredit macet.
- Rasio Modal terhadap Aset (CAR): Mengukur kemampuan perusahaan untuk menyerap kerugian.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore (MAS), terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan bank umum di Indonesia dan Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa bank Singapura memiliki modal yang lebih kuat dibandingkan dengan bank umum di Indonesia. Bank umum Indonesia dan Singapura memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara. Di Indonesia, bank umum milik negara (BUMN) memainkan peran utama dalam menyalurkan dana pemerintah dan mengelola aset negara. Di Singapura, bank umum milik pemerintah (Temasek) juga memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan negara. (2023)

Indikator kinerja keuangan negara adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Indikator kinerja keuangan negara meliputi berbagai aspek, seperti:

1. Kesesuaian terhadap perencanaan: Indikator ini menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

2. Efektivitas pelaksanaan anggaran: Indikator ini menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa yang berdampak kepada penyerapan anggaran.
3. Efisiensi pelaksanaan anggaran: Indikator ini menilai efisiensi pelaksanaan anggaran, seperti realisasi penyerapan anggaran terhadap pagunya.
4. Kepatuhan terhadap peraturan: Indikator ini menilai kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan di bidang pelaksanaan anggaran.

Indikator kinerja keuangan negara digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan. IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat kontrol dalam melakukan pengawasan pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja.(2013)

Upaya yang harus dilakukan Indonesia dan Singapura untuk meningkatkan pengelolaan kinerja keuangan negara seperti memperkuat transparansi dan akuntabilitas yaitu seperti meningkatkan akses publik terhadap informasi keuangan negara, menerapkan mekanisme pelaporan keuangan yang lebih komprehensif dan akuntabel, memperkuat peran lembaga pengawas keuangan negara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya dengan meningkatkan penegakan hukum seperti memperkuat kapasitas dan independensi aparat penegak hukum, menerapkan aturan hukum yang lebih tegas dan konsisten dalam menangani pelanggaran keuangan negara, meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya penegakan hukum di bidang keuangan negara. Meningkatkan kualitas SDM seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pengelola keuangan negara, menerapkan sistem meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi jabatan aparatur pengelola keuangan negara, memberikan tunjangan dan jaminan yang kompetitif bagi aparatur pengelola keuangan negara dan mendorong budaya kerja yang profesional dan berintegrasi tinggi dalam pengelolaan

keuangan negara. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara seperti melakukan reformasi sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan negara, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara, melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara, dan menerapkan benchmarking dengan negara-negara lain yang memiliki pengelolaan keuangan negara yang baik. Meningkatkan kerjasama internasional, seperti berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan negara dengan negara lain, berpartisipasi dalam forum internasional terkait pengelolaan keuangan negara, serta mendukung upaya internasional untuk mengurangi korupsi dan pencucian uang.

2. Kajian Literatur

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis pengelolaan kinerja keuangan negara yaitu:

1) Teori Good Governance

Teori Good Governance (tata kelola yang baik) merupakan teori yang mendasari pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien. Teori ini menekankan pada pentingnya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum dalam pengelolaan keuangan negara. (2019)

- ✓ **Transparansi:** Informasi keuangan negara harus mudah diakses dan dipahami oleh publik.
- ✓ **Akuntabilitas:** Pengelola keuangan negara harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada publik.
- ✓ **Partisipasi:** Masyarakat harus dilibatkan dalam proses penganggaran dan pengelolaan keuangan negara.
- ✓ **Supremasi Hukum:** Aturan hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten dalam pengelolaan keuangan negara.

2) Teori Neo-Institusionalisme

Teori Neo-Institusionalisme dalam pengelolaan keuangan negara mengemukakan bahwa organisasi terbenam dalam lingkungan sosial dan politik sehingga praktik-praktik dan struktur organisasional sering berupa refleksi atau tanggapan terhadap aturan, kepercayaan, kebiasaan yang sudah terbangung dalam lingkungan yang lebih luas. Teori ini memperhatikan bagaimana struktur, seperti skema, aturan, norma dan rutin, menjadi bentuk yang bersifat otoritatif untuk terjadinya perilaku sosial. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Namun, pendekatan ini juga dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan masyarakat merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan di daerah mereka. (Darono et al., n.d.)

Institusi yang kuat dan aturan yang jelas dan konsisten dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

- ✓ Institusi: Institusi yang kuat dan independen dapat membantu menegakkan aturan hukum dan mencegah korupsi.
- ✓ Aturan: Aturan yang jelas dan konsisten dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

3) Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemerintah) dan agen (aparatur pengelola keuangan negara). Prinsipal yang harus memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan mereka.

- ✓ Prinsipal: Pemerintah sebagai prinsipal harus merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan

keuangan negara yang jelas dan efektif.

- ✓ Agen: Aparatur pengelola keuangan negara sebagai agen harus melaksanakan kebijakan dan strategi pemerintah dengan bertanggung jawab dan transparan.

4) Teori Biaya Transaksi

Teori biaya administrasi dalam pengelolaan keuangan negara berfokus pada pengeluaran biaya yang terkait dengan kegiatan administrasi keuangan negara. Biaya administrasi negara meliputi pengeluaran untuk kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan, dan hasil-hasil fisik dari pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Dalam pengelolaan keuangan negara, biaya administrasi berfungsi mendukung operasional bisnis agar tetap berlangsung. Jenis biaya ini dapat dibedakan menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel, masing-masing memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda. (2020)

Teori biaya transaksi menjelaskan bahwa setiap transaksi ekonomi selalu melibatkan biaya. Biaya transaksi dalam pengelolaan keuangan negara dapat berupa biaya pengumpulan informasi, biaya penegakan hukum dan biaya monitoring.

- ✓ Biaya Pengumpulan Informasi: Pemerintah perlu mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan informasi tentang keuangan negara.
- ✓ Biaya Penegakan Hukum: Pemerintah perlu mengeluarkan biaya untuk menegakkan aturan hukum dalam pengelolaan keuangan negara.
- ✓ Biaya Monitoring: Pemerintah perlu mengeluarkan biaya untuk monitoring dan evaluasi

pengelolaan keuangan negara.

5) Teori Ekonomi Politik

Teori ekonomi politik menjelaskan bagaimana faktor politik dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

- ✓ **Kepentingan Politik:** Kepentingan politik elit penguasa dapat mempengaruhi alokasi sumber daya keuangan negara.
- ✓ **Lembaga Politik:** Lembaga politik yang kuat dan demokrasi dapat membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

6) Studi Kasus Bank Umum Indonesia dan Singapura

Studi kasus bank umum di Indonesia dapat membantu memahami perbedaan pengelolaan keuangan negara di kedua negara. Bank umum di kedua negara memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara, baik dalam menyalurkan dana pemerintah maupun dalam mengelola aset negara.

- ✓ **Indonesia:** Bank umum di Indonesia umumnya dimiliki oleh pemerintah (BUMN) dan memiliki peran penting dalam menyalurkan dana pemerintah untuk berbagai program pembangunan.
- ✓ **Singapura:** Bank umum di Singapura umumnya dimiliki oleh swasta dan memiliki peran penting dalam mengelola aset negara dan menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat.

Perbedaan kepemilikan dan peran bank umum di kedua negara dapat memengaruhi cara pengelolaan keuangan negara. Bank umum milik pemerintah di Indonesia mungkin

lebih rentan terhadap intervensi politik, sedangkan bank umum swasta di Singapura mungkin lebih fokus pada profitabilitas.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan manajemen kinerja keuangan nasional di negara berkembang dan negara maju khusus dengan mempelajari bank komersial di Indonesia dan Singapura. Ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif untuk menganalisis data dari sumber yang dapat diandalkan. Studi ini berfokus pada evaluasi perbedaan dalam manajemen kinerja keuangan antara negara berkembang dan negara maju, menyoroti perbedaan dalam struktur keuangan, stabilitas, likuiditas, dan pemantauan risiko.

Penelitian ini menilai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sistem manajemen keuangan di negara maju di bandingkan dengan negara berkembang, menekankan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara seperti Indonesia karena sumber daya yang terbatas dan pengawasan keuangan yang tidak efektif. Studi ini juga meneliti kebijakan keuangan Singapura yang jelas dan konsisten, membandingkannya dengan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam manajemen kinerja keuangan, seperti sumber daya yang terbatas dan pengawasan yang tidak memadai.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan dari perbandingan pengelolaan kinerja keuangan negara di negara berkembang dan negara maju yang menunjukkan beberapa perbedaan yang signifikan seperti:

1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi keuangan negara mencerminkan bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan dan digunakan dalam satu negara. Struktur ekonomi yang sehat dan seimbang dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Perbandingan Struktur keuangan negara terbagi menjadi 2 yaitu;

- 1) **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**
 - **Indonesia**
 - Pendapatan**
 - Pajak: 60,5% (2023)
 - Non-Pajak: 39,5% (2023)
 - Belanja**

- Belanja Barang dan Jasa: 30,2% (2023)
- Belanja Modal: 12,8% (2023)
- Transfer ke Daerah dan Dana Otonomi Khusus: 57,0% (2023)
- Singapura

Pendapatan

- Pajak: 67,7% (2022)
- Non-Pajak: 32,2% (2022)

Belanja

- Belanja Barang dan Jasa: 24,5% (2022)
- Belanja Modal: 12,0% (2022)
- Transfer ke Daerah dan Dana Otonomi Khusus: 63,5% (2022)

Struktur APBN Indonesia menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap pendapatn dari pajak. Sementara itu, struktur APBN Singapura menunjukkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk transfer ke daerah dan dana otonomi khusus.

2) Utang Negara

- ✓ Indonesia: 38,0% dari PDB (2023)
- ✓ Singapura: 10,0% dari PDB (2023)

Rasio utang negara terhadap PDB menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat utang yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura. Hal ini dapat menjadi risiko bagi stabilitas keuangan negara.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia SDM yang berkualitas merupakan faktor kunci bagi kemajuan dan daya suatu bangsa. Bank Indonesia maupun Singapura sama-sama menyadari pentingnya kualitas SDM untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Namun kedua negara ini memiliki konteks dan tantangan yang berbeda dalam upaya meningkatkan kualitas SDM.

1) Tantangan Peningkatan Kualitas SDM.

- ✓ Indonesia: Akses pendidikan yang belum merata, Tingkat partisipasi sekolah yang rendah, Keterampilan yang tidak sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja serta Minimnya pelatihan dan pengembangan SDM. • Singapura: Biaya pendidikan yang tinggi, Persaingan global untuk talenta terbaik, dan Penuaan penduduk.

2) Upaya Pelatihan dan Pengembangan SDM.

Indonesia:

- ✓ Pemerintah: Meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, Memperkuat kerjasama dengan industri dan dunia usaha untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM
- ✓ Masyarakat: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, Mengikuti pelatihan dan pengembangan diri untuk meningkatkan keterampilan, dan beradaptasi dengan perusahaan dan perkembangan teknologi.

Singapura:

- ✓ Pemerintah: Berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, mempermudah imigrasi bagi talenta asing yang berkualitas, dan menyediakan subsidi beasiswa untuk pendidikan.
- ✓ Masyarakat: Menabung dan berinvestasi untuk pendidikan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di sepanjang hayat, dan beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan teknologi.

Peningkatan kualitas SDM merupakan upaya berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Baik Indonesia maupun Singapura memiliki tantangan dan peluang masing-masing dalam upaya ini. Dengan kerjasama dan saling berbagi pengalaman, kedua negara dapat

saling belajar dan meningkatkan kualitas SDM secara bersama-sama.

3. Pasar Keuangan dan Lembaga Regulasi

1. Pasar Keuangan

1. Struktur Pasar Keuangan

Indonesia:

- ✓ Pasar Uang: Pasar antarbank, pasar repo, pasar Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pasar Surat Berharga Negara (SBN)
- ✓ Pasar Modal: Bursa Efek Indonesia (BEI), Pasar Derivatif Indonesia (IDX Derivatives)
- ✓ Pasar Asuransi: Asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi syariah
- ✓ Pasar Modal Syariah: Sukuk, Reksadana Syariah

Singapura:

- ✓ Pasar Uang: Pasar antarbank, pasar repo, pasar Singapore Dollar Negotiable Certificates of Deposit (S\$NCD), pasar Singapore Government Securities (SGS)
- ✓ Pasar Modal: Singapore Exchange (SGX), Pasar Derivatif Singapore (SGX Derivatives)
- ✓ Pasar Asuransi: Asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi captives
- ✓ Pasar Modal Syariah: Sukuk, Reksadana Syariah

2. Instrumen Pasar Keuangan

Indonesia:

- ✓ Pasar Uang: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Negara (SBN),

Deposito, Repurchase Agreement (Repo)

- ✓ Pasar Modal: Saham, Obligasi, Sukuk, Reksadana, Kontrak Berjangka, Opsi o Pasar Asuransi: Polis asuransi jiwa, Polis asuransi umum, Polis asuransi syariah
- ✓ Pasar Modal Syariah: Sukuk, Reksadana Syariah

Singapura:

- ✓ Pasar Uang: Singapore Dollar Negotiable Certificates of Deposit (S\$NCD), Singapore Government Securities (SGS), Repurchase Agreement (Repo)
- ✓ Pasar Modal: Saham, Obligasi, Sukuk, Reksadana, Kontrak Berjangka, Opsi o Pasar Asuransi: Polis asuransi jiwa, Polis asuransi umum, Polis asuransi captives
- ✓ Pasar Modal Syariah: Sukuk, Reksadana Syariah

3. Peran Pasar Keuangan

Indonesia:(2022)

- ✓ Mobilisasi dana (Financial Inclusion Policy: Developed vs Developing Countries Chairuddin Syah Nasution, n.d.)
- ✓ Alokasi dana
- ✓ Manajemen risiko
- ✓ Fasilitasi perdagangan
- ✓ Mendukung pertumbuhan ekonomi

Singapura:

- ✓ Hubungan keuangan internasional
- ✓ Pusat manajemen kekayaan
- ✓ Pusat penerbitan surat berharga
- ✓ Pusat perdagangan derivatif
- ✓ Mendukung pertumbuhan ekonomi.

4. Lembaga Regulasi

1. Lembaga Regulator Pasar Keuangan

Indonesia:

- ✓ Bank Indonesia (BI): Otoritas moneter dan regulator pasar uang

- ✓ Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Regulator pasar modal, asuransi, dan dana pensiun
- ✓ Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Penjamin simpanan di bank

Singapura:

- ✓ Monetary Authority of Singapore (MAS): Otoritas moneter dan regulator pasar keuangan
- ✓ Insurance Authority of Singapore (IAS): Regulator pasar asuransi
- ✓ Securities Industry Council (SIC): Regulator pasar modal
- o Central Provident Fund (CPF): Lembaga pengelola dana pensiun.

2. Peran Lembaga Regulasi

Indonesia:

- ✓ Menjaga stabilitas sistem keuangan
- ✓ Melindungi konsumen
- ✓ Mempromosikan efisiensi dan transparansi pasar
- ✓ Mendorong inovasi dan pengembangan pasar keuangan

Singapura:

- ✓ Menjaga stabilitas dan ketahanan sistem keuangan
- ✓ Mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan pasar keuangan
- ✓ Meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar keuangan
- ✓ Melindungi konsumen dan investor.

5. Perbedaan dan Persamaan

5.1. Perbedaan

- ✓ Struktur Pasar: Indonesia memiliki pasar modal yang lebih kecil dibandingkan dengan Singapura. Singapura memiliki pasar derivatif yang lebih berkembang

dibandingkan dengan Indonesia.

- ✓ Instrumen Pasar: Indonesia memiliki sukuk sebagai instrumen pasar modal syariah. Singapura memiliki polis asuransi captives sebagai instrumen pasar asuransi.
- ✓ Peran Pasar: Indonesia menggunakan pasar keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Singapura menggunakan pasar keuangan untuk mendukung hubungan keuangan internasional.
- ✓ Lembaga Regulasi: Indonesia memiliki beberapa lembaga regulator untuk pasar keuangan, sedangkan Singapura memiliki satu lembaga regulator untuk semua pasar keuangan.

5.2. Persamaan

Kedua negara memiliki pasar uang, pasar modal, dan pasar asuransi. Kedua negara memiliki lembaga regulator yang bertugas menjaga stabilitas dan efisiensi pasar keuangan. Kedua negara ingin menggunakan pasar keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. (2022)

5. Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan kinerja fiskal nasional merupakan aspek penting dalam mencapai stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi. Kinerja fiskal nasional yang baik akan mendukung pemerintah dalam melaksanakan berbagai rencana pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan kinerja fiskal nasional antara negara berkembang dan negara maju. Sistem pengelolaan keuangan nasional negara maju umumnya lebih transparan, akuntabel, dan efisien dibandingkan negara berkembang. Hal ini tercermin dari indikator kinerja keuangan

sektor publik yang lebih baik di negara maju dibandingkan di negara berkembang.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore (MAS), terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan bank umum di Indonesia dan Singapura. Bank Singapura memiliki modal yang lebih kuat dibandingkan dengan bank umum di Indonesia. Upaya yang harus dilakukan Indonesia dan Singapura untuk meningkatkan pengelolaan kinerja keuangan negara seperti memperkuat transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Struktur ekonomi keuangan negara mencerminkan bagaimana sumber daya ekonomi dialokasikan dan digunakan dalam satu negara. Struktur ekonomi yang sehat dan seimbang dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Indonesia memiliki struktur APBN yang menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap pendapatan dari pajak, sedangkan Singapura memiliki alokasi anggaran yang lebih besar untuk transfer ke daerah dan dana otonomi khusus.

Sumber daya manusia SDM yang berkualitas merupakan faktor kunci bagi kemajuan dan daya suatu bangsa. Indonesia memiliki tantangan seperti akses pendidikan yang belum merata, tingkat partisipasi sekolah yang rendah, keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta minimnya pelatihan dan pengembangan SDM. Singapura memiliki biaya pendidikan yang tinggi, persaingan global untuk talenta terbaik, dan penuaan penduduk.

Pasar keuangan dan lembaga regulator di Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan yang signifikan. Indonesia memiliki pasar modal yang lebih kecil dibandingkan dengan Singapura, dan Singapura memiliki pasar derivatif yang lebih berkembang dibandingkan dengan Indonesia. Lembaga regulator di Indonesia memiliki beberapa lembaga regulator untuk pasar keuangan, sedangkan Singapura memiliki satu lembaga regulator untuk semua pasar keuangan.

Pasar keuangan di Indonesia digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, sedangkan pasar keuangan di Singapura digunakan untuk mendukung hubungan keuangan internasional. Lembaga regulator di Indonesia memiliki peran yang lebih luas dibandingkan dengan Singapura. Indonesia memiliki lembaga regulator yang bertugas menjaga stabilitas dan efisiensi pasar keuangan, serta melindungi konsumen dan investor. Singapura memiliki lembaga regulator

yang lebih fokus pada menjaga stabilitas dan ketahanan sistem keuangan, serta mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan pasar keuangan.

Kedua negara memiliki pasar uang, pasar modal, dan pasar asuransi. Kedua negara memiliki lembaga regulator yang bertugas menjaga stabilitas dan efisiensi pasar keuangan. Kedua negara ingin menggunakan pasar keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi..

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Dosen pengampu dan team yang membantu menyelesaikan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Darsono, A., Diklat Keuangan Malang, B., & Keuangan Jlahmad Yani, K. R. (N.D.). Penggunaan Teori Institusional Dalam Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia.
- Financial Inclusion Policy: Developed Vs Developing Countries Chairuddin Syah Nasution. (N.D.). Keuangan, A., & Penerbit, N. (2020). Prodi Dlii Administrasi Negara.
- Kore, A. B. R., & Prasasyaningsih, X. I. (2023). Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Pertumbuhan Berkelanjutan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 39. <https://doi.org/10.21460/Jrmb.2023.181.459>
- Magdalena, M., Kurniawan, C. H., Pengajar, S., Ekonomi, F., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2013). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Modus*, 25(1), 2013.
- www.djpk.depkeu.go.id Riset Ekonomi Makro Dan Keuangan, P., Riset Dan Inovasi Nasional, B., Kebijakan Pendapatan Negara, P., Kebijakan Fiskal, B., Kebijakan Regional Dan Bilateral, P., Riset Ekonomi Industri, P., Dan Perdagangan, J., & Riset Kebijakan Publik, P. (2022). Kinerja Perdagangan Indonesia-Singapura Dan Malaysia (Indonesia-Singapore And Malaysia Trade Performance)
- Ragimun 1) , Rudi Handoko 2) , Imran Rosjadi 3) , Mutaqin 4) Dan Akhmad Yasin 5) 1). *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 2022.

- Saputri, D., & Kaharti, E. (2022). Analisis Perbandingan Dampak Sebelum Dan Sesudah Merger Horizontal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (Jimmba)*, 4(2), 181–189. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i2.70>
- Sumini, S., & Sari, S. P. (2019). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Perbandingan Negara-Negara Di Asia Tenggara (The Local Government Financial Performance: Southeast Asia Countries Comparison). *Journal Of Economics Development Issues*, 2(02), 15–23. <https://doi.org/10.33005/jedi.v2i02>.